



UJIAN TENGAH SEMESTER

ECON 12003: PEREKONOMIAN INDONESIA

Hari Rabu, Tanggal 22 MARET 2017, Pukul 13:00 -- 16:00 WIB

3 JAM, TUTUP BUKU, BOLEH MENGGUNAKAN KALKULATOR SEDERHANA

Jangan lupa berdoa terlebih dahulu

Dosen	Asisten
Lana Soelistianingsih	Ina Erdawita
Dorodjatun Kuntjoro-Jakti / M. Arsjad Anwar	Nadia Khairani
Sri Mulyani Indrawati / Mohammad Ichsan	Dewi Sukma Anggriyani
Jossy P. Moeis	Bertha Fania Maula
T.M. Zakir S. Machmud	Amalia Wardani

A. SOAL WAJIB

1. Struktur demografi Indonesia saat ini berada dalam kategori 'Bonus Demografi', Jelaskan:
 - a. Arti dari Bonus Demografi atau juga dikenal sebagai Deviden Demografi;
 - b. Bagaimana dampak dari struktur demografi tersebut terhadap perubahan lingkungan bisnis (business environment) di Indonesia;
 - c. Bagaimana bonus demografi ini bisa menjadi kekuatan perekonomian Indonesia?(nilai 20)

2. Tahun 2017 adalah tahun ketiga Pemerintahan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mewujudkan cita-cita Nawacita yang telah menjadi komitmen Pemerintah. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, maka pemerintah menghadapi tantangan global berupa: (1) perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian; dan (2) masih relatif rendahnya harga komoditas. Sejalan dengan itu, faktor domestik dipengaruhi oleh: (1) pertumbuhan ekonomi nasional yang belum optimal sebagai konsekuensi sektor industri manufaktur yang masih lemah; dan (2) perlambatan perekonomian global dan penurunan harga komoditas berdampak nyata pada pencapaian pendapatan negara.

Dengan mempertimbangkan perkiraan kondisi perekonomian global tersebut, asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2017 adalah: (1) pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen; (2) inflasi sebesar 4,0 persen; (3) nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar Rp13.300 per dolar Amerika Serikat; (4) suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,3 persen; (5) harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) sebesar USD45 per barel; (6) lifting minyak Indonesia sebesar 780 ribu barel per hari; dan (7) lifting gas sebesar 1.150 ribu barel setara minyak per hari. Penyusunan asumsi dasar ekonomi makro tersebut mengacu pada sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah yang terdapat pada RPJMN 2015—2019, sasaran-sasaran tahunan dalam RKP tahun 2017, serta perkembangan dan prospek ekonomi domestik maupun global tahun 2017.



Berdasarkan informasi di atas ditambah dengan data pada Tabel 2.1. dan 2.2., Anda diminta untuk menjawab:

- Hitunglah ICOR tahun 2011-2015 dan interpretasikan nilai ICOR tersebut!
- Asumsi makroekonomi manakah yang Anda akan gunakan untuk menentukan jumlah tambahan kebutuhan tabungan (yang diinvestasikan) dari asing? Hitunglah kebutuhan tabungan (yang diinvestasikan) dari asing pada tahun 2017 menggunakan informasi data tersebut dengan asumsi ICOR bernilai sama dan tingkat tabungan sebesar 30%!
- Jika menggunakan tingkat tabungan 30% dan hanya melibatkan domestik, berapa pertumbuhan ekonomi yang realistis dapat dicapai oleh Indonesia?
- Apakah realistis jika untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai dengan indikator makroekonomi yang digunakan hanya dengan melibatkan domestik? Jelaskan alasan dari jawaban Anda!
- Kebijakan** apa saja yang dapat diambil pemerintah untuk mendukung tercapainya **pertumbuhan ekonomi** sesuai indikator makroekonomi yang digunakan dalam menyusun RAPBN?

(bobot 25)

Tabel 2.1. PDB Berdasarkan Pengeluaran Menurut Harga Berlaku (Dalam Miliar Rp) Tahun 2010-2016

Penggunaan PDB	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	3.786.063	4.260.076	4.768.745	5.321.088	5.915.194	6.477.577	7.009.578
a. Makanan dan Minuman, Selain Restoran	1.457.599	1.638.644	1.854.629	2.049.782	2.247.451	2.490.642	2.750.382
b. Pakaian, Alas Kaki dan Jasa Perawatannya	154.222	175.860	187.041	203.089	221.633	239.249	255.606
c. Perumahan dan Perlengkapan Rumahtangga	516.320	569.629	637.060	705.522	774.867	850.102	900.082
d. Kesehatan dan Pendidikan	255.277	290.850	327.738	359.752	394.268	433.991	473.066
e. Transportasi dan Komunikasi	894.898	993.369	1.085.926	1.246.467	1.420.289	1.508.760	1.595.515
f. Restoran dan Hotel	337.158	385.156	443.100	499.346	570.465	636.739	693.749
g. Lainnya	170.589	206.569	233.251	257.131	286.222	318.094	341.177
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	72.759	80.530	89.586	103.929	124.242	130.951	144.470
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	618.178	709.451	796.848	908.574	996.197	1.124.812	1.172.420
a. Konsumsi Kolektif	381.064	444.289	492.963	568.131	622.774	692.657	723.492
b. Konsumsi Individu	237.115	265.162	303.885	340.443	373.423	432.155	448.929
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	2.127.841	2.451.914	2.819.026	3.051.496	3.436.924	3.782.143	4.040.498
a. Bangunan							



	1.580.435	1.791.932	2.053.896	2.242.780	2.569.122	2.844.115	3.037.240
b. Mesin dan Perlengkapan	220.378	280.002	329.147	343.132	3.575.483	377.519	364.874
c. Kendaraan	123.095	146.580	179.039	172.446	163.609	173.924	208.295
d. Peralatan Lainnya	30.761	35.531	38.480	41.709	49.215	59.047	68.941
e. CBR	125.663	145.934	159.227	177.280	201.676	225.516	246.694
f. Produk Kekayaan Intelektual	47.509	51.934	59.236	74.149	95.753	102.023	114.454
5. Perubahan Inventori	129.095	131.329	202.638	178.091	220.231	158.754	214.105
6. Ekspor Barang dan Jasa	1.667.918	2.061.886	2.118.979	2.283.777	2.501.425	2.439.107	2.367.332
a. Barang	1.520.295	1.890.412	1.918.040	2.044.358	2.223.342	2.131.563	2.035.473
a.1. Barang Non-migas	1.266.971	1.528.932	1.572.451	1.703.499	1.869.262	1.884.921	1.862.123
a.b. Barang migas	253.324	361.481	345.589	340.859	354.080	246.642	173.349
b. Jasa	147.623	171.474	200.939	239.419	278.083	307.544	331.859
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	1.537.720	1.868.075	2.152.937	2.359.212	2.580.508	2.389.633	2.271.178
a. Barang	1.280.689	1.596.456	1.850.040	2.012.940	2.177.253	1.963.460	1.854.825
a.1. Barang Non-migas	1.021.879	1.230.538	1.439.293	1.523.386	1.652.229	1.625.136	1.598.146
a.b. Barang migas	258.809	365.918	410.747	489.554	525.024	338.325	256.679
b. Jasa	257.031	271.619	302.897	346.272	403.255	426.172	416.353
Diskrepani Statistik	- 0	4.616	27.182	58.392	44.000	191.993	270.415
8. PRODUK DOMESTIK BRUTO	6.864.133	7.831.726	8.615.705	9.546.134	10.569.705	11.531.717	12.406.810

Kanopi FEBUI
Unity in Development

Tabel 2.2. PDB Deflator Tahun 2010-2016



Tahun	PDB Deflator (Tahun Dasar 2010, 2010 = 100)
2010	100
2011	117
2012	119
2013	121
2014	123
2015	127
2016	129

3. Coba perhatikan tabel berikut:

Tabel 3.1. Kemiskinan dan Ketimpangan Pengeluaran di Indonesia (September 2016)

Daerah	Jumlah Penduduk Miskin (juta jiwa)	Angka Kemiskinan (%)			Garis Kemiskinan (Rp/cap/bln)	Rasio Gini (%)	Share 40% Termiskin (% dari total)
		P0	P1	P2			
Perkotaan	10,49	7,73	1,21	0,29	372.144	40,9	16,02
Perdesaan	17,28	13,96	2,32	0,59	350.420	31,6	20,52
Indonesia	27,76	10,70	1,74	0,44	361.990	39,4	17,11

Sumber: BPS, Berita Resmi Statistik.

- Dengan menggunakan angka di Tabel 1, jelaskan kondisi kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia pada bulan September 2016 (bandingkan antar daerah dengan menggunakan berbagai ukuran). (10 poin)
- Kemiskinan mengakibatkan munculnya biaya sosial yang berupa besarnya subsidi yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah/masyarakat agar penduduk miskin dapat hidup minimal dengan standar hidup yang layak (garis kemiskinan). Cobalah hitung besarnya biaya sosial dari kemiskinan di perkotaan, perdesaan, dan total Indonesia dengan data di atas. Berikan pemaknaan dari angka yang saudara peroleh. [*hints*: jumlah populasi dapat dihitung dari angka P0 dan jumlahnya]. (5 poin)
- Jelaskan berbagai argumen urjensi dan perlunya upaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. (5 poin)
- Ungkapkan pandangan kritis saudara terhadap angka kemiskinan dan ketimpangan pada tabel di atas dan kaitkan dengan jawaban pada bagian c tentang urjensi dan pentingnya upaya mengatasi kemiskinan dan ketimpangan. (5 poin)

(Bobot 25)

SOAL PILIHAN:

PILIH 2 DARI 5 SOAL BERIKUT. BOBOT @15



1. Indonesia merupakan negara berbentuk kepulauan yang memiliki kekayaan alam maupun sumber daya manusia yang melimpah. Untuk mewujudkan cita-cita menjadi negara maju melalui pengoptimalan pemanfaatan sumber daya tersebut, maka dibutuhkan penguatan sektor yang memiliki nilai tambah paling besar yaitu sektor industri. Hal ini membuat pemerintah menerbitkan Visi Pembangunan Industri Nasional sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Industri Tangguh pada tahun 2025. Untuk mencapai visi tersebut, dicanangkan pula visi antara pada tahun 2020 untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Industri Maju Baru. Hal ini sesuai dengan Deklarasi Bogor tahun 1995 antara para kepala Negara APEC bahwa pada tahun tersebut, liberalisasi di negara-negara APEC harus sudah terwujud.

Sebagai negara industri maju baru, sektor industri Indonesia harus mampu memenuhi beberapa kriteria dasar antara lain: 1) Memiliki peranan dan kontribusi/*share* tinggi bagi perekonomian Nasional, 2) IKM memiliki kemampuan yang seimbang dengan Industri Besar, 3) Memiliki struktur industri yang kuat (Pohon Industri lengkap dan dalam), 4) Teknologi maju telah menjadi ujung tombak pengembangan dan penciptaan pasar, 5) Telah memiliki jasa industri yang tangguh yang menjadi penunjang daya saing internasional industri, dan 6) Telah memiliki daya saing yang mampu menghadapi liberalisasi penuh dengan negara-negara APEC. Diharapkan tahun 2020 kontribusi industri non-migas terhadap PDB telah mampu mencapai 30%, dengan kontribusi industri kecil (IK) ditambah industri menengah (IM) sama atau mendekati kontribusi industri besar (IB). Dari uraian di atas dan berdasarkan data pada Tabel 2.1., Anda diminta untuk menjawab:

- a) Bagaimana perkembangan **kontribusi** setiap sektor terhadap PDB, sektor manakah yang memiliki kontribusi paling tinggi?
- b) Berdasarkan hasil perhitungan di poin 1, menurut Anda apakah Indonesia dapat mencapai target pada tahun 2020?

Tabel .1.1. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2005-2014

Lapangan Usaha	2005	2006	2007	2008	2009
1. PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	364.169,3	433.223,4	541.931,5	716.656,2	857.196,8
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	309.014,1	366.520,8	440.609,6	541.334,3	592.060,9
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	760.361,3	919.539,3	1.068.653,9	1.376.441,7	1.477.541,5
4. LISTRIK, GAS, DAN AIR BERSIH	26.693,8	30.354,8	34.723,8	40.888,6	46.680,0
5. B A N G U N A N	195.110,6	251.132,3	304.996,8	419.711,9	555.192,5
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	431.620,2	501.542,4	592.304,1	691.487,5	744.513,5
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	180.584,9	231.523,5	264.263,3	312.190,2	353.739,7
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERSH.					



	230.522,7	269.121,4	305.213,5	368.129,7	405.162,0
9. JASA – JASA	276.204,2	336.258,9	398.196,7	481.848,3	574.116,5
PRODUK DOMESTIK BRUTO	2.774.281,1	3.339.216,8	3.950.893,2	4.948.688,4	5.606.203,4
PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS	2.458.234,3	2.967.040,3	3.534.406,5	4.427.633,5	5.141.414,4

Tabel 1.2. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2005-2014 [Lanjutan]

Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013*	2014**
1. PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	985.470,5	1.091.447,1	1.193.452,9	1.310.427,3	1.446.722,3
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	719.710,1	876.983,8	972.458,4	1.026.297,0	1.058.750,2
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	1.599.073,1	1.806.140,5	1.972.523,6	2.152.802,8	2.394.004,9
4. LISTRIK, GAS, DAN AIR BERSIH	49.119,0	55.882,3	62.271,6	70.339,6	81.131,0
5. B A N G U N A N	660.890,5	753.554,6	844.090,9	907.267,0	1.014.540,8
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	882.487,2	1.023.724,8	1.148.791,0	1.301.175,0	1.473.559,7
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	423.172,2	491.287,0	549.105,4	635.302,9	745.648,2
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERSH.	466.563,8	535.152,9	598.433,3	682.973,2	771.961,5
9. JASA – JASA	660.365,5	785.014,1	889.798,8	1.000.691,7	1.108.610,3
PRODUK DOMESTIK BRUTO	6.446.851,9	7.419.187,1	8.230.925,9	9.087.276,5	10.094.928,9
PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS	5.941.951,9	6.795.885,6	7.589.809,0	8.419.133,9	9.391.537,3

2. Selama 15 tahun terakhir, telah banyak indikator yang menunjukkan perbaikan pada keadaan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah peningkatan nilai pendapatan per kapita. Sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita tersebut, perbaikan keadaan ekonomi ini ditandai dengan proses transformasi struktural, meliputi proses akumulasi dan alokasi. Dengan menggunakan data pada Tabel 2.1. dan 2.2. berikut ini, jawablah pertanyaan berikut ini:

- Jelaskan apa itu **proses akumulasi** dan tunjukkan **tiga indikator** yang menurut Anda penting untuk menjelaskan transformasi perekonomian Indonesia pada **proses akumulasi**. Jelaskan pula bagaimana perkembangan indikator tersebut selama 15 tahun terakhir dan apakah menurut Anda indikator tersebut sesuai dengan pola yang normal dalam proses transformasi struktural? Berikan argumen Anda!
- Jelaskan apa itu **proses alokasi** dan tunjukkan **tiga indikator** yang menurut Anda penting untuk menjelaskan transformasi perekonomian Indonesia pada **proses alokasi**. Jelaskan pula bagaimana perkembangan indikator tersebut selama 15 tahun terakhir dan apakah menurut Anda indikator



tersebut sesuai dengan pola yang normal dalam proses transformasi struktural? Berikan argumen Anda!

- c) Setelah memahami kedua proses tersebut (akumulasi dan alokasi), menurut Anda, bagaimana peran *tax amnesty* terhadap proses transformasi perekonomian Indonesia?

Tabel 2.1. Indikator Perekonomian Indonesia Tahun 2000-2015

INDICATORS	2000	2008	2010	2013	2015
Population, total	211.540.428,00	235.360.765,00	241.613.126,00	251.268.276,00	257.563.815,00
Population growth (annual %)	1,38	1,31	1,31	1,29	1,21
GDP (current US\$)	165.021.012.077,81	510.228.634.992,26	755.094.160.363,07	912.524.136.718,02	861.933.968.740,33
GDP growth (annual %)	4,92	6,01	6,22	5,56	4,79
Inflation, GDP deflator (annual %)	20,45	18,15	15,26	4,97	4,23
Agriculture, value added (% of GDP)	15,6	14,48	13,93	13,36	13,52
Industry, value added (% of GDP)	45,93	48,06	42,78	42,64	40,01
Services, etc., value added (% of GDP)	38,47	37,46	40,67	41,52	43,32
Exports of goods and services (% of GDP)	40,98	29,81	24,3	23,92	21,09
Imports of goods and services (% of GDP)	30,46	28,75	22,4	24,71	20,85
Gross capital formation (% of GDP)	22,25	27,82	32,88	33,83	34,56
Revenue, excluding grants (% of GDP)	..	19,79	14,46	15	..
Time required to start a business (days)	..	83	49	75,5	47,8
Domestic credit provided by financial sector (% of GDP)	60,68	36,77	34,18	43,43	46,72
Tax revenue (% of GDP)	..	13,31	10,54	11,29	..
Military expenditure (% of GDP)	0,68	0,63	0,62	0,92	0,89
High-technology exports (% of manufactured exports)	16,37	10,9	9,78	7,05	..
External debt stocks, total (DOD, current US\$)	144.031.659.000,00	157.906.449.000,00	198.268.131.000,00	265.452.855.000,00	308.539.944.000,00
Total debt service (% of exports of goods, services and primary income)	22,85	14,29	17,41	19,54	32,13
Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US\$)	-4.550.355.285,71	9.318.453.649,83	15.292.009.410,51	23.281.742.361,53	20.054.270.303,89
Net official development assistance and official aid received (current US\$)	1.653.000.000,00	1.230.620.000,00	1.389.570.000,00	64.770.000,00	..
Primary completion rate, total (% of relevant age group)	..	96,55	100,25	100,59	..



Gross enrollment ratio, primary, both sexes (%)	108,78	107,51	108,66	106,34	..
Gross enrolment ratio, secondary, both sexes (%)	55,1	69,73	76,54	82,49	..

Tabel 2.2. Indikator Partisipasi Sekolah Indonesia 2001-2015

INDIKATOR	2001	2005	2010	2015
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	107,21	106,63	111,63	109,94
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	78,1	82,09	80,35	90,63
Angka Partisipasi Kasar (APK) SM/MA	46,47	55,21	62,53	77,39
Angka Partisipasi Kasar (APK) PT	10,36	11,06	16,35	20,89
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	92,88	93,25	94,72	96,2
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	60,47	65,37	67,62	77,45
Angka Partisipasi Murni (APM) SM/MA	37,13	43,5	45,48	59,46
Angka Partisipasi Murni (APM) PT	7,99	8,71	11,01	17,34
Pendidikan yang Ditamatkan Penduduk 15 Tahun ke Atas				
Tidak/belum sekolah	11,65	8,85	7,28	5,9
Tidak tamat SD	17,53	15,23	12,74	12,62
SD/ sederajat	33,03	32,07	29,72	27,79
SMP/ sederajat	17,07	19,48	20,57	21,44
SM +/-sederajat	20,71	24,37	29,69	32,25

3. Pembangunan seharusnya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Pembangunan akan mengurangi kemiskinan dan ketimpangan bila memihak pada orang miskin (pro-poor). Hal ini ditandai dengan pertumbuhan pendapatan (dalam hal ini pengeluaran digunakan sebagai proksi) orang miskin yang lebih tinggi dari pada orang kaya. Grafik 1 menyajikan pembangunan yang terjadi pada periode 1994-1999 (garis tegas hitam), 1999-2004 (garis strip-strip), 2004-2009 (garis titik-titik), dan 2009-2014 (garis tegas abu-abu). Sumbu tegak adalah persentase pertumbuhan pengeluaran dan sumbu datar adalah kelompok persentil pengeluaran dari 1 (paling miskin) hingga 100 (paling kaya).

Kanopi FEBUI

Gambar 3.1. Kurva Insiden Pertumbuhan Pengeluaran kelompok Persentil pada periode 1994-1999, 1999-2004, 2004-2009, dan 2009-2014



Sumber : Diolah dari data Susenas berbagai tahun.

- a. Jelaskan apakah di masing-masing periode pembangunannya bersifat pro-poor atau tidak. Jelaskan pula apakah pembangunan antar periode semakin pro-poor atau sebaliknya semakin tidak pro-poor. (5 poin)
 - b. Apa konsekuensi dari kecenderungan pola pembangunan yang seperti ini terhadap kemiskinan dan ketimpangan? Menurut saudara, apa kebijakan pembangunan yang harus diambil mengingat kondisi kecenderungan pola pembangunan tersebut dalam kaitannya untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan? (5 poin)
 - c. Berikan pandangan kritis saudara tentang pembangunan yang dalam kenyataannya tidak berhasil mengatasi kemiskinan dan ketimpangan. Sebagian pihak malah menggugat pembangunan sebagai penyebab terjadinya pemiskinan dan menghasilkan jurang yang semakin dalam antara si kaya dan si miskin. Apa hakekat pembangunan yang sebenarnya dan bagaimana bentuk riil nya, terutama dalam perekonomian Indonesia? (10 poin)
 - d. Pembangunan adalah proses kebudayaan dimana nilai-nilai ditanamkan dan diperkuat. Jelaskan beberapa nilai yang perlu ditanamkan dan diperkuat dalam pembangunan nasional sehingga menjamin keadilan dan kemakmuran bagi semua, tidak terkecuali (hilangnya kemiskinan dan ketimpangan). (5 poin)
4. Selain pertumbuhan ekonomi, kondisi perekonomian Indonesia ditentukan pula oleh adanya kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Karakteristik kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia memiliki beberapa dimensi.
- a. Jelaskan beberapa (minimal tiga) karakteristik kemiskinan dan ketimpangan yang ada dalam perekonomian Indonesia. (5 poin)
 - b. Uraikan beberapa poin penting dari potret kemiskinan yang saudara tangkap dari lapangan (tugas mewawancarai satu objek). (5 poin)
 - c. Dengan memanfaatkan teori dan berbagai perspektif yang saudara ketahui jelaskan penyebab kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. (5 poin)



- d. Dari berbagai hasil studi empiris yang pernah dilakukan oleh para ahli, jelaskan hubungan antara pertumbuhan, kemiskinan, dan ketimpangan yang menjadi *stylized facts*. (5 poin)
- e. Berikan ulasan kritis saudara tentang pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan dikaitkan dengan cara pengukuran pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan angka PDB riil dan pengukuran kemiskinan dan ketimpangan yang didasarkan pada pengeluaran rumah tangga. (5 poin).
5. Pilihlah lima dari delapan pasangan konsep di bawah ini. Jelaskan arti pasangan konsep tersebut terkait dengan kemiskinan-ketimpangan dan uraikan perbedaan maupun persamaannya. Kemudian berikan contoh dalam kenyataannya di lapangan, dalam perekonomian Indonesia. (masing-masing 5 poin)
- Pro-poor vs inclusive development.*
 - Inclusion vs exclusion error.*
 - Targeted vs self-targeted subsidy program.*
 - Basic needs vs basic rights poverty approach.*
 - Chronic vs transient poor.*
 - Trickle down effect vs dualistic economy and social.*
 - Formal vs non-formal sector.*
 - Top-up vs bottom-up empowerment.*



Kanopi FEBUI
Unity in Development